BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar diatur melalui Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

DPKP sebagai lembaga teknis daerah dibentuk dengan tujuan menunjang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, yang meliputi :

- Sub Urusan Perumahan, kewenangan kabupaten/kota mencakup (1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota. (2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Sub Urusan Kawasan Permukiman, kewenangan kabupaten/kota mencakup Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha.
- Sub Urusan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), kewenangan kabupaten/kota mencakup penyelenggaraan PSU perumahan.
- Sub Urusan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kewenangan kabupaten/kota

mencakup sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil.

Permasalahan Strategis di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni di Kabupaten Kepulauan Selayar, Masih rendahnya kawasan kumuh yang tertata, berdasarkan telaahan terhadap Renstra yaitu belum optimalnya Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota, Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak, hal ini berkaitan dengan Visi : Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia pada Misi 1 Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan dan Misi 3 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan Program yang mendukung pencapaian kedua Misi tersebut yaitu:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
b. Program Pengembangan Perumahan;
c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Program Kawasan Permukiman;
e. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
f. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Terhadap Telaahan RTRW struktur ruang wilayah direncanakan pengembangannya dengan penataan pusat-pusat pemerintahan, pusat-pusat permukiman, pusat-pusat kegiatan industri, perdagangan barang dan jasa serta simpul transportasi yang ada di wilayah ini. Penatagunaan ruang yang berskala internal kabupaten/ kota diserahkan wewenang dan tanggung jawabnya kepada kabupaten/kota masing-masing, sehingga dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis yaitu :

- Perlunya pengoptimalan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat rumah layak huni di perumahan dan kawasan permukiman,
- Perlunya pengoptimalan pemenuhan Prasana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di perumahan dan kawasan permukiman,
- Adanya prioritas dan dukungan dalam penanganan kawasan permukiman secara terpadu.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dinas perumahan dan kawasan permukiman kabupaten kepulauan selayar bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar akan berupaya melakukan percepatan pembangunan untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang belum merata menyebabkan adanya kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Kepulauan Selayar. Salah satu infrastruktur dasar masyarakat yang harus dipenuhi dengan layak adalah perumahan dan kawasan pemukiman.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan infrastruktur perumahan mencakup antara lain belum optimalnya sistem data dan informasi perumahan dimana aplikasi yang digunakan saat ini dari pemerintah antara lain e-RTLH melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), aplikasi SIBARU untuk Sistem Informasi Usulan Bantuan Program Perumahan. Selain itu, permasalahan lainnya yaitu keterbatasan akses pembiayaan rumah untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), masih adanya perumahan yang belum memiliki standar layak huni sesuai Keputusan Menteri Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor 403 tahun 2002.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan infrastruktur kawasan permukiman antara lain masih rendahnya kawasan kumuh yang tertata dan masih tingginya luasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten/kota, belum optimalnya sistem data dan informasi kawasan permukiman, belum optimalnya pemenuhan layanan

PSU seperti pengelolaan, jalan lingkungan dan drainase lingkungan di kawasan permukiman.

Permasalahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), dimana rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia selain sandang dan pangan dimana kondisi rumah tinggal secara kasat mata akan memperlihatkan tingkat kesejahteraan penduduk. Salah satu prasyarat kondisi perumahan yang baik adalah apabila sanitasinya baik dan terstruktur. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar belum mencukupi sehingga pembangunan infrastruktur harus diarahkan pada rumah tangga yang tidak menggunakan sanitasi yang layak karena sangat berpengaruh sekali dalam penurunan tingkat kesehatan di masyarakat.

Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni di Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun permasalahan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Aspek	Permasalahan
1.	Permasalahan dalam Bidang Perumahan	1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi 2. Belum adanya ketersediaan lahan untuk relokasi 3. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni di Kabupaten Kepulauan Selayar 4. Belum optimalnya sistem data dan informasi perumahan

No.	Aspek	Permasalahan
		5. Keterbatasan akses pembiayaan rumah untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
2.	Permasalahan dalam Bidang Kawasan Permukiman	1. Masih rendahnya kawasan kumuh yang tertata 2. Penetapan lokasi kawasan permukiman kumuh bukan menjadi kewenangan kabupaten/kota 3. Belum optimalnya sistem data dan informasi kawasan permukiman 4. Belum optimalnya pemenuhan layanan PSU seperti pengelolaan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi dan air limbah di kawasan permukiman.
3.	Permasalahan dalam bidang Prasarana Sarana Umum	1. Masih sulit dan terbatasnya pemenuhan air bersih di beberapa pulau di wilayah Kepulauan 2. Belum adanya database prasarana, sarana dan utilitas dalam rangka pencapaian tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terletak pada titik koordinat -5.90973,121.36036, yang beralamat di Jl. Kemiri No. 27 Telp. (0414) 21313 Benteng Kepulauan Selayar, Email : diperkimdpkp@gmail.com.



Visi dan Misi Kepala Daerah

Menelaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar dapat diuraikan sebagai berikut :

Visi

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Sehingga berdasarkan permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yang berbasis pada sumberdaya maritim serta memperhatikan rumusan visi RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 dan RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar 2005-2025 dengan visi “Selayar sebagai Kabupaten Maritim Terdepan, Mapan, Mandiri, dan Berkelanjutan” maka Visi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut :

"Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim
Kawasan Timur Indonesia"

Rumusan Pemaknaan Visi :

- **Bandar Maritim** adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa dan industri.
- **Kawasan Indonesia Timur** : Berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/ kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku dan Maluku Utara.

Indikator utama yang hendak diwujudkan pada akhir periode RPJMD dengan visi Bandar Maritim ini adalah: 1. Kepulauan Selayar berperan menjadi simpul transportasi laut nasional; 2. Pengelolaan sumberdaya alam yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin; 3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan serta menjadi penyedia komoditas ekspor perikanan dan non perikanan; 4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

Bandar maritim didukung oleh 3 (tiga) pilar pembangunan, yaitu:

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pammatata dan sekitarnya, ditopang oleh 5 (lima) sub-kawasan yakni:
   a. Sub-kawasan utama pada Pelabuhan Benteng;
   b. Sub-kawasan 2 (dua) pada kawasan pelabuhan Benteng-Jampea;
   c. Sub-Kawasan 3 (tiga) pada Kawasan Pelabuhan Bonerate;
   d. Sub-Kawasan 4 (empat) pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.
2. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di Pasi - Gusung, didukung oleh tujuh sub-kawasan yakni:
   a. Sub-Kawasan 1 pada Kawasan Matalalang;

b. Sub-Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya;
c. Sub-Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pinang;
d. Sub-Kawasan 4 pada Kawasan Pantai Bahuluang;
e. Sub-Kawasan 5 pada Kawasan Pantai Polassi;
f. Sub-Kawasan 6 pada Kawasan Pantai Kayuadi;
g. Sub-Kawasan 7 pada Kawasan Pantai Pulau Panjang.

3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, yang didukung oleh 5 (lima) sub-sentra:
   a. Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang;
      Sub-Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi;
   b. Sub-Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng-Jampea;
   c. Sub-Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate;
   d. Sub-Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Misi

Misi merupakan gambaran upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. misi Kepulauan Selayar disusun untuk memperjelas langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan Kepulauan Selayar sebagai **Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia**. Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Kepulauan Selayar yang berbasis maritim meliputi :

1. Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan
2. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
4. Mengembangkan pengelolaan potensi kelautan
5. Meningkatkan pembinaan kehidupan social dan keagamaan
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup

Dari keenam Misi Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut di atas, maka Misi Pertama, Kedua dan Ketiga yang terkait dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar.

Misi Pertama, Kedua dan Ketiga tersebut dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan infrastruktur baik prasarana dan sarana yang berkualitas dan aksesibel serta merata dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pembangunan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman. Keterkaiatan antara Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepualan Selayar Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026

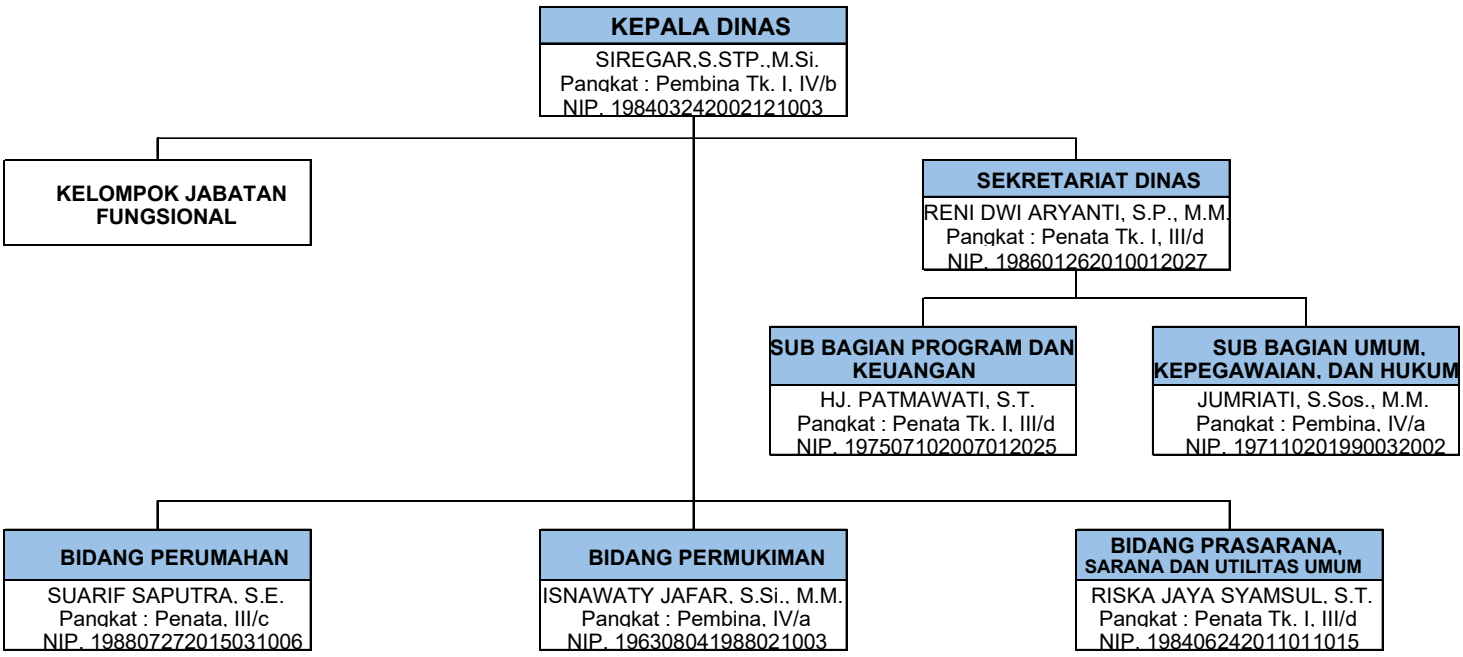
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan	Mewujudkan Reformasi Birokrasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	- Nilai Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Perkim - Laporan Keuangan Dinas Perkim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) - Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Dinas Perkim (%)
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Meningkatkan Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	- Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) - Meningkatnya Pemenuhan PSU Perumahan	- Rasio Rumah Layak Huni - Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU

1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, meliputi :
    1. Subbagian Program dan Keuangan
    2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
c. Bidang Perumahan
d. Bidang Permukiman
e. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
f. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan, Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kawasan permukiman,
b. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU),
c. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang verifikasi dan sertifikasi,
d. Pelaksanaan administrasi dinas, dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsi.

1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualiikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural

a. Jumlah Aparatur Sipil Negara

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan data tahun 2025 sebanyak 26 orang. Berdasarkan Golongan jabatan pada satuan kerja ini lebih didominasi golongan III sebanyak 19 orang atau 73% dari total pegawai yang ada. Sedangkan berdasarkan pendidikan terakhir lebih didominasi tingkat pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 19 orang atau dengan persentase 73%, setelah itu untuk tingkat pendidikan SMA berjumlah sebanyak 3 orang atau 11%, 4

orang untuk tingkat pendidikan Magister (S2) atau dengan persentase 15% artinya memiliki potensi yang cukup besar untuk pemanfaatan SDM dalam menjalankan tupoksi masing-masing. Potensi SDM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Tabel 1.3 dan Tabel 1.4.

Tabel 1.3

Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Golongan Jabatan Berdasarkan Jenis Kelamin

Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	P	L	
I	0	0	0
II	2	1	3
III	7	12	19
IV	2	2	4
Total	**11 orang**	**15 orang**	**26 orang**

Sumber : Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum

Tabel 1.4

Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Kualifikasi Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SD	-
SLTP	-
SMA	3 Orang
Diploma	-
S1	19 Orang
S2	4 Orang
S3	-
Total	**26 Orang**

Sumber : Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum

b. Jumlah Pejabat Struktural

Data jabatan struktural pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan data tahun 2025 sebanyak 7 orang, yaitu Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Perumahan, Kepala Bidang Permukiman, Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum dan Kepala Subbagian Program dan Keuangan.

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

2.1.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

DPKP sebagai lembaga teknis daerah dibentuk dengan tujuan menunjang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Rangkaian program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pada Tahun 2025 ini adalah bagian integral dalam mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan merupakan suatu perjanjian kinerja antara Kepala SKPD dengan Bupati Kepulauan Selayar. Pada Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.10.567.305.000,- dengan rincian Belanja Operasi Rp.4.091.805.000,- dan Belanja Modal Rp.6.475.500.000,- selanjutnya melalui mekanisme perubahan APBD, anggaran keseluruhan berubah menjadi Rp. 7.919.508.050,- dengan rincian Belanja Operasi Rp. 4.000.198.000,- dan Belanja Modal Rp. 3.919.310.050,-. Perubahan anggaran ini dilakukan dengan pertimbangan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan. Dari total anggaran sebesar Rp.7.919.508.050,- anggaran yang terbelanjakan sebesar Rp.7.578.286.548,- dan terdapat sisa anggaran sebesasr Rp.341.221.502,- dengan realisasi keuangan sebanyak 95,69%.

Program dan Kegiatan dilaksanakan setiap tahun dengan penekanan prioritas kinerja sesuai dengan kebutuhan anggaran yang telah direncanakan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 melaksanakan program dan kegiatan yang mengacu pada RKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan 6 Program dan 14 Kegiatan dengan 38 sub kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**656,15%**			
					Rp 3.055.969.500	**Rp 2.899.313.211**			
				Kegiatan :					
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**100%**	**75,00%**			
					Rp 6.177.400	**Rp 5.405.810**			
				- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			
					Rp 2.284.100	Rp 2.025.130			
				- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-			
					Rp 0	Rp 0			
				- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan	1 Dokumen	-			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					RKA-SKPD					
						Rp 0	Rp 0			
				-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
						Rp 1.153.500	Rp 1.004.123			
				-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-			
						Rp 0	Rp 0			
				-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan			
						Rp 1.088.500	Rp 910.903			
				-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp 1.651.300	Rp 1.465.654			
				Kegiatan :					
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**100%**	**289,10 %**			
					Rp 2.400.013.000	**Rp 2.259.927.422**			
				- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang	25 Orang			
					Rp 2.398.355.000	Rp 2.258.366.926			
				- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	-			
					Rp 0	Rp 0			
				- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan			
					Rp 404.900	Rp 370.803			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen			
					Rp 1.253.100	Rp 1.189.693			
				Kegiatan :					
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**100%**	**0 %**			
					Rp 0	**Rp 0**			
				- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-			
					Rp 0	Rp 0			
				Kegiatan :					
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**100%**	**0 %**			
					Rp 0	**Rp 0**			
				- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	1 Laporan	-			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				dan Fungsi					
					Rp 0	Rp 0			
				Kegiatan :					
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**100%**	**97,61 %**			
					Rp 242.597.300	**Rp 236.792.557**			
				- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	-			
					Rp 0	Rp 0			
				- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket			
					Rp 13.662.000	Rp 12.813.000			
				- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket			
					Rp 10.136.000	Rp 9.282.672			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				- Penyediaan Bahan/Material	1 Paket	1 Paket			
					Rp 37.524.300	Rp 33.421.885			
				- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			
					Rp 181.275.000	Rp. 181.275.000			
				Kegiatan :					
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**93,88 %**			
					Rp 262.651.800	**Rp 258.282.765**			
				- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	-			
					Rp 0	Rp 0			
				- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan			
					Rp 74.981.400	Rp 73.733.965			
				- Penyediaan Jasa	1 Laporan	1 Laporan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Pelayanan Umum Kantor					
					Rp 187.670.400	Rp 184.548.800			
				Kegiatan :					
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**96,26 %**			
					Rp 144.530.000	**Rp 138.904.657**			
				- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21 Unit	21 Unit			
					Rp 132.640.000	Rp 127.094.657			
				- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40 Unit	21 Unit			
					Rp 11.890.000	Rp 11.810.000			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	-			
					Rp 0	Rp 0			
				Program Pengembangan Perumahan	**100%**	**98,98%**			
					Rp 72.520.000	**Rp 71.778.641**			
				Kegiatan :					
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**100%**	**96,05 %**			
					Rp 72.520.000	**Rp 71.778.641**			
				- Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah	1 Dokumen	-			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Khusus					
					Rp 0	Rp 0			
				- Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-			
					Rp 0	Rp 0			
				- Identiikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			
					Rp 43.520.000	Rp 43.066.257			
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan					
				- Koordinasi dan	1 Laporan	1 Laporan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan					
					Rp 29.000.000	Rp 28.712.384			
				Program Kawasan Permukiman	**100%**	**199,18%**			
					Rp 483.160.500	**Rp 482.019.194**			
				Kegiatan :					
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	**100%**	**99,38%**			
					Rp 43.757.100	**Rp 43.486.974**			
				- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	1 Laporan			
					Rp 43.757.100	Rp 43.486.974			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan :					
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	**100%**	**0 %**			
					Rp 0	**Rp 0**			
				- Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	1 Dokumen	-			
					Rp 0	Rp 0			
				Kegiatan :					
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	**100%**	**99,80%**			
					Rp 439.403.400	**Rp 438.532.220**			
				- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	5 Unit Rumah	5 Unit Rumah			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp 429.923.200	Rp 429.319.290			
				- Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen			
					Rp 9.480.200	Rp 9.212.930			
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	**100 %**	**100 %**			
					Rp 40.000.000	**Rp 40.000.000**			
				Kegiatan :					
				Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	**100%**	**100%**			
					Rp 40.000.000	**Rp 40.000.000**			
				Kegiatan :					
				- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh	50 Unit Rumah	50 Unit Rumah			
					Rp 40.000.000	Rp 40.000.000			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	**100 %**	**95,71 %**			
					Rp 4.252.408.050	**Rp 4.069.926.302**			
				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	**100 %**	**95,71 %**			
					Rp 4.252.408.050	**Rp 4.069.926.302**			
				Kegiatan :					
				- Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen			
					Rp 28.950.000	Rp 28.901.410			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	18 Lokasi	18 Lokasi			
					Rp 4.132.292.050	Rp 3.950.090.480			
				- Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	1 Laporan			
					Rp 27.646.000	Rp 27.414.412			
				- Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	1 Laporan	1 Laporan			
					Rp 63.520.000	Rp 63.520.000			
				Program Peningkatan	**100 %**	**98,70 %**			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	**Rp 15.450.000**	**Rp 15.249.200**			
				Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	**Rp 15.450.000**	**Rp 15.249.200**			
				Kegiatan :					
				- Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan	1 Laporan	1 Laporan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kualifikasi Kecil					
					Rp 15.450.000	Rp 15.249.200			
TOTAL					**Rp 7.919.508.050**	**Rp 7.578.286.548**			

2.1.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
1.	Persentase penurunan luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	%	5,27	8,6	163,1	

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
2.	Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	10,40	37,58	361,3	
3.	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	8,27	1,33	16,08	
4.	Persentase rekomendasi pengusulan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi pengembang yang diterbitkan	%	100	0	0	
5.	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	%	100	100	100	
6.	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat	%	100	0	0	

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
	program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)					

2.1.3. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN URUSAN

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 tidak mengelola program dan kegiatan berdasarkan urusan.

2.1.4. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No.	Urusan Pemerintahan Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5=4-3*	*6=(4/3)*100*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	**Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**								
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp. 7.919.508.050	Rp. 7.578.286.548	Rp. 341.221.502	95,69	6	98,00	14	91,75

2.1.5. INOVASI

NO.	URAIAN INOVASI	MAKSUD DAN TUJUAN INOVASI	HASIL/ MANFAAT	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*

NO.	URAIAN INOVASI	MAKSUD DAN TUJUAN INOVASI	HASIL/ MANFAAT	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

2.1.6. PRESTASI/PENGHARGAAN

No.	Nama Penghargaan	Tingkat				Diselenggarakan oleh/Penyelenggara	Ket.
		Internasional	Nasional	Provinsi	Kabupaten		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

2.2. KEBIJAKAN DAERAH (PERDA, PERBUP, DAN KEPUTUSAN BUPATI) YANG DIINISIASI OLEH PERANGKAT DAERAH

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Ket.
		Nomor/Tanggal Pengesahan	Tentang		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Petunjuk Teknis Pengesahan Rencana Tapak Perumahan	Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 30/Tanggal 31 Oktober Tahun 2025	Petunjuk Teknis Pengesahan Rencana Tapak Perumahan	Menciptakan hunian perumahan yang layak, berimbang, sehat dan tertata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mencegah potensi kekumuhan pada perumahan, menjamin hak masyarakat dalam mendapatkan akses prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan yang layak dan sesuai standar, sebagai bentuk pengendalian dan pembinaan perumahan oleh pemerintah daerah dan sebagai dasar untuk pemecahan sertifikat prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah	

2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	*2*	*3*	*4*
1.	a. Segera melakukan revisi terhadap Peraturan Bupati terkait Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) agar lebih fleksibel dari segi kriteria dan persyaratan	a. Draf Peraturan Bupati terkait penanganan rumah tidak layak huni baik dalam kawasan kumuh maupun di luar kawasan kumuh telah disusun dan dikonsultasikan dengan bagian hukum setda. Hasil konsultasi tersebut yakni untuk penanganan RTLH dalam kawasan kumuh menggunakan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perumahan Swadaya pada kawasan kumuh dibawah 10 Ha, dan untuk penanganan RTLH di luar kawasan kumuh menggunakan juknis program bantuan stimulan perumahan swadaya dari kementerian PKP sehingga progres penyusunan Perbup tersebut hanya sampai pada draf Perbup.	
	b. Melakukan pembenahan tanggul penahan ombak di daerah pasca bencana dibeberapa wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar	b. Bukan kewenangan OPD	

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1. Tugas Pembantuan dan Penugasan Yang Dilaksanakan (NIHIL)

3.2. Hambatan-Hambatan (NIHIL)

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak mengelola tugas pembantuan.

BAB IV
PENUTUP

Secara umum, Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya pada bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat diselenggarakan dengan optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi tersebut juga sangat ditopang oleh kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

Capaian kinerja tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijelaskan dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ini, sesungguhnya merupakan kinerja segenap komponen yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar, yang telah melaksanakan tugas dan fungsi masing–masing dalam rangka mendukung Selayar sebagai Kabupaten Kepulauan Maritim yang sejahtera berbasis nilai keagamaan dan budaya.

Meskipun Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat diselenggarakan secara optimal berdasarkan indikasi pencapaian sasaran program dan kegiatan oleh segenap Instansi/Unit Kerja yang ada dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, namun disadari bahwa masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi keterbatasan, permasalahan dan hambatan yang melingkupi.

Dengan mengacu pada kondisi permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025, maka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun-tahun berikutnya akan terus dilakukan penyempurnaan dan perbaikan, khususnya dalam memenuhi harapan masyarakat.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 ini disusun sebagai suatu kewajiban konstitusional dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sekian dan Terima Kasih

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Benteng, 19 Januari 2026

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

SIREGAR, S.STP., M.Si.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19840324 200212 1 003